

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara umum, petani di Jawa Barat masih mempunyai kinerja tingkat kemandirian yang rendah, dari skor kumulatif maksimal 100, petani secara rata-rata baru mencapai skor nilai sekitar 65. Skor rendah terutama pada aspek perilaku daya saing, petani masih berada dibawah skor nilai 50. Artinya, tingkat kesiapan petani menghadapi era globalisasi masih relatif belum memadai. Dari kinerja yang masih relatif rendah tersebut, sekitar 37.5 persen petani di Jawa Barat pada saat ini masih berada pada tingkat kemandirian rendah yakni di bawah 65.

Antar lapisan petani masih terdapat kesenjangan tingkat kemandirian, terutama di zona selatan dan tengah Jawa Barat. Petani terutama lapisan atas, telah mempunyai wawasan (kognitif) kemodernan dan keefisienan yang cukup baik, namun belum ditunjang dengan sikap dan ketrampilan yang sejalan dengan itu, sehingga perilaku daya saingnya pun menjadi sangat lemah. Kelemahan terutama menyangkut aspek ketrampilan (psikomotorik) berdaya saing dan keefisienan berkaitan erat dengan lemahnya aksesibilitas petani terhadap sarana produksi dan aksesibilitas petani terhadap pemasaran hasil usahatani.

- 2) Fakta hasil uji statistik membuktikan bahwa tingkat kemandirian petani secara signifikan dipengaruhi disamping oleh faktor internal juga dipengaruhi oleh faktor eksternal petani. Faktor internal tersebut meliputi: (1) status sosial, (2) kualitas pribadi, (3) ciri komunikasi, (4) motivasi intrinsik dan, (5) motivasi ekstrinsik, sedangkan faktor eksternal tersebut meliputi: (1) kualitas penyuluhan, (2) pengaruh pasar komoditi pertanian, (3) desakan perkembangan sektor luar pertanian, (4)

penetrasi produk non pertanian, (5) sarana penunjang pengembangan pertanian, (6) ketersediaan sumberdaya informasi secara lokal, (7) kondisi lingkungan fisik dan, (8) kebijakan pembangunan pertanian.

Kualitas penyuluhan yang ada selain merupakan salah satu faktor eksternal petani yang secara signifikan sangat mempengaruhi tingkat kemodernan petani, ternyata secara signifikan juga mempengaruhi tingkat perilaku keefisienan dan perilaku daya hidup petani.

Faktor-faktor eksternal petani selengkapnyanya yang terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian petani secara berturut-turut dari yang paling nyata : (1) aksesibilitas petani terhadap input usahatani, (2) aksesibilitas petani terhadap pasar, (3) kualitas penyuluhan, (4) aksesibilitas petani terhadap sumberdaya informasi/inovasi, (5) lingkungan fisik sumberdaya alam, (6) penetrasi produk ke dalam kebutuhan rumahtangga petani, (7) desakan perkembangan sektor pertanian terhadap sektor pertanian dan pedesaan, dan (8) implementasi kebijakan pembangunan pertanian setempat.

Sejumlah faktor-faktor internal juga terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian petani, secara berturut-turut dari yang paling nyata: (1) ciri-ciri perilaku komunikasi petani yang relatif terbuka, (2) kualitas kepribadian petani, (3) status sosial ekonomi petani, (4) motivasi ekstrinsik yang ada pada petani, dan (5) motivasi intrinsik petani yang bersangkutan.

Implikasi dari hal di atas adalah bahwa pola intervensi yang dinilai tepat untuk mengembangkan kemandirian petani adalah mengkondisikan faktor-faktor eksternal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

petani sedemikian rupa sehingga dengan faktor internal petani yang ada dapat terjadi proses belajar secara mandiri pada petani.

Pada saat ini, lemahnya keterpaduan berbagai kelembagaan penunjang sistem bisnis terhadap komitmen pengembangan usahatani telah menjadi titik lemah yang mendasar dalam pengembangan penyuluhan pertanian yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian petani.

Model penyuluhan dengan pendekatan model penyuluhan dialogis, hadap masalah (humanis), dan dengan model komunikasi konvergen secara signifikan lebih efektif untuk meningkatkan kemandirian petani dibanding dengan model penyuluhan yang sentralistik *top-down (transfer of technology)* dan dengan model komunikasi yang linier.

Pada saat ini telah ada gejala terjadi transformasi implementasi penyuluhan dalam masyarakat pertanian di Jawa Barat dari pola penyuluhan yang berciri *top down*, sentralistis dengan model komunikasi yang linier (*dehumanis*) menuju ke pola penyuluhan konvergen yang berciri partisipatif, desentralistis dengan model komunikasi konvergen (*humanis*). Pergeseran ini terbukti makin berdampak kondusif pada meningkatnya kemandirian petani.

Tingkat kedinamisan penyuluh secara signifikan mempengaruhi kualitas penyuluhan yang konvergen dan selanjutnya mempengaruhi tingkat kemandirian petani.

Pada saat ini secara rata-rata tingkat kedinamisan penyuluh masih relatif kurang memadai untuk mengembangkan kemandirian petani (rata-rata skor nilai kedinamisan penyuluh 66 dari skor maksimum 100). Sebenarnya wawasan (aspek kognitif) penyuluh tentang pola penyuluh konvergen sudah relatif baik, tetapi masih belum

1. Ditargetkan sebagai salah satu indikator atau seluruh hasil tulisan ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber; atau
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya hanya untuk tujuan pribadi atau institusi.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
4. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya hanya untuk tujuan pribadi atau institusi.

diimbangi dengan aspek sikap dan ketrampilan yang sejalan dengan itu, sehingga kualitas penyuluhan menjadi lemah dan tingkat kemandirian petani pun menjadi kurang berkembang. Beberapa masalah utama yang dihadapi penyuluh antara lain :

- (1) penguasaan IPTEK tepat guna kurang berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat,
- (2) terancam menghadapi kejenuhan pada faktor usia, kemampuan menjangkau inovasi IPTEK, jenjang karir dan perkembangan aspek kelembagaan penyuluhan, dan
- (3) masih terbatas menangani aspek produksi dan kurang mampu menjangkau aspek sistem agribisnis secara komprehensif.

Kelembagaan kemitraan antara petani dengan investor swasta di dalam sistem agribisnis yang berhasil mengembangkan kerjasama saling menguntungkan dan berkesinambungan terbukti merupakan salah satu penerap model pola penyuluhan dengan model komunikasi konvergen yang ideal.

Saran

Dinilai tepat terjadinya kecenderungan transformasi paradigma implementasi penyuluhan dari yang berorientasi ke pusat (sentralistis), berciri *top down*, pencapaian target produksi dengan menempatkan petani lebih sebagai alat untuk mencapai swasembada pangan, dengan menerapkan model komunikasi linier, bergeser ke paradigma implementasi penyuluhan yang berorientasi ke petani (humanisasi), dialogis, hadap masalah dengan komunikasi konvergen. Peranan swasta pada kemitraan dengan petani dalam sistem agribisnis tampaknya cukup kondusif bagi perkembangan kemandirian petani sehingga dapat mengurangi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

tergantungan pada dominasi intervensi pemerintah dalam penyuluhan yang lebih berorientasi ke proyek pusat.

Hubungan antara lembaga penunjang sistem agribisnis (perbankan, lembaga bisnis swasta, lembaga pengembang IPTEK, lembaga penyuluhan dan lembaga pelayanan/organisasi) dapat menjadi alternatif yang tepat untuk mengatasi masalah stagnasi inovasi di tingkat petani dan penyuluh yang telah cenderung terjadi pada saat ini.

Waktu yang akan datang akan semakin penting untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menggali potensi kelembagaan lokal yang dapat menjadi media bagi pengembangan inovasi bagi sistem agribisnis pada umumnya dan sistem usahatani pada khususnya.

Penelitian yang menyangkut pengembangan kemandirian belajar, baik menyangkut terutama pengembangan metoda dan teknik kecondusifan belajar mandiri akan menjadi semakin diperlukan untuk memperkaya metoda dan teknik-teknik belajar secara mandiri bagi orang dewasa (para pelaku sistem agribisnis).

Hal yang juga akan menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut adalah mengukur tingkat kesiapan lembaga bisnis yang berkecimpung dalam sistem agribisnis, seperti investor dan pemodal lainnya, dalam menghadapi era globalisasi dan pertanian berkelanjutan di era yang sama.

1. Ditinjau dari Undang-Undang Perdagangan
2. Ditinjau dari Undang-Undang Koperasi
3. Ditinjau dari Undang-Undang Perikanan
4. Ditinjau dari Undang-Undang Kehutanan
5. Ditinjau dari Undang-Undang Pertambangan dan Energi
6. Ditinjau dari Undang-Undang Perindustrian
7. Ditinjau dari Undang-Undang Perhubungan
8. Ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan
9. Ditinjau dari Undang-Undang Pendidikan dan Kebudayaan
10. Ditinjau dari Undang-Undang Agama
11. Ditinjau dari Undang-Undang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
12. Ditinjau dari Undang-Undang Lingkungan Hidup
13. Ditinjau dari Undang-Undang Pertahanan dan Pertahanan Negara
14. Ditinjau dari Undang-Undang Luar Negeri
15. Ditinjau dari Undang-Undang Pidana
16. Ditinjau dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
17. Ditinjau dari Undang-Undang Tata Negara
18. Ditinjau dari Undang-Undang Hukum Acara Perdata
19. Ditinjau dari Undang-Undang Hukum Acara Pidana
20. Ditinjau dari Undang-Undang Hukum Acara Tata Usaha Negara
21. Ditinjau dari Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
22. Ditinjau dari Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
23. Ditinjau dari Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
24. Ditinjau dari Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
25. Ditinjau dari Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
26. Ditinjau dari Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
27. Ditinjau dari Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
28. Ditinjau dari Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
29. Ditinjau dari Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
30. Ditinjau dari Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara